

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Luthfi

Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 22 Februari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat di Malang : Jl Cengger Ayam Dalam 1 No 100

Alamat Asal : Perumahan Taman Wisma Asri II Blok BB 32/22 Bekasi
Utara

NIM : 135030601111018

Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik

Universitas : Universitas Brawijaya

No. Telepon : 081280013559

Alamat E-mail : luthfimuhammad02@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	TA Nurus Sa'adah Bekasi Utara	2000-2001
2	SDN Teluk Pucung VII Bekasi Utara	2001-2007
3	SMP Mutiara 17 Agustus Bekasi Utara	2007-2010
4	SMA Negeri 4 Bekasi Utara	2010-2013
5	S-1 Minat Perencanaan Pembangunan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2013-2018

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN RISET FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9072 /UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jalan A. Yani No. 98
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Luthfi
Alamat : Jalan Cengger Ayam Dalam 1, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 135030601111018
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sewa dalam Mengurangi Permasalahan Permukiman Kumuh Di DKI Jakarta
Lamanya : 2 Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Juni 2017

Mengetahui,



Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001

LAMPIRAN II

SURAT IZIN PENELITIAN BANGKESBANGPOL KOTA MALANG



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/197.06.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan FIA Univ. Brawijaya Malang No. 9072/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : MUHAMMAD LUTHFI. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030601111018.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sewa dalam Mengurangi Permasalahan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Perumahan & Gedung pemerintah daerah Prov. DKI Jakarta - DPMPTSP Prov. DKI Jakarta.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 29 Juli 2017*.

Malang, 19 Juni 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,


DICKY HARYANTO, SH., MM.
Pembina
NIP. 19690511 199703 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. - Koordinator Minat Perencanaan
Pembangunan FIA Univ. Brawijaya
Malang;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN BADAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU (BPTSP) PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Jalan Tanah Abang I No. 1 Telepon 3441481 Faksimile -
Email ptsp.jakpus@gmail.com
J A K A R T A

Kode Pos 10160

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 00083 / 16.1.0 / 31.71.01.1002 / 1.862.9 / 2017

- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Menimbang :** Surat permohonan dari Saudara Muhammad Luthfi No. 9072/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 19 JUNI 2017 perihal izin mengadakan penelitian untuk Riset / Survey, serta surat rekomendasi izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat No. tanggal .

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan izin kepada :

1. Nama : Muhammad Luthfi
2. Alamat : Jl. Cengger Ayam Dalam 1, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA DALAM MENGURANGI PERMASALAHAN PEMUKIMAN KUMUH DI DKI JAKARTA
- b. Tempat/Lokasi : Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Bidang Penelitian : Administrasi Publik
- d. Waktu : 04 Agustus 2017 s.d 04 Oktober 2017
- e. Penanggung Jawab : Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- c. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- f. Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN IV

SURAT KETENTUAN PELAKSANAAN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telepon : 34833708, 3865369, Fax: 3847151
 JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 3484 /-1.851.84
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Riset/Survey

10 Agustus 2017

Kepada
 Yth. Dekan Universitas Brawijaya Fakultas
 Ilmu Administrasi
 di
 Malang

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor 8037/UN10.F03.11.11/PN/2017, perihal Riset/Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui mahasiswa/ Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi :

Nama : Muhammad Luthfi
 Alamat : Jalan Cengger Ayam Dalam 1, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 135030601111018
 Jurusan : Administrasi Publik
 Kosentrasi/Minat : Perencanaan Bangunan
 Tema : Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sewa dalam Mengurangi Permasalahan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta
 Lamanya : 2 Bulan
 Peserta : 1 (satu) orang

Untuk Melakukan Riset/Survey di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya agar yang bersangkutan menghubungi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris Dinas,



Eko Satrio, S.Sos, M.Si
 NIP. 1962071993021001

Tembusan :

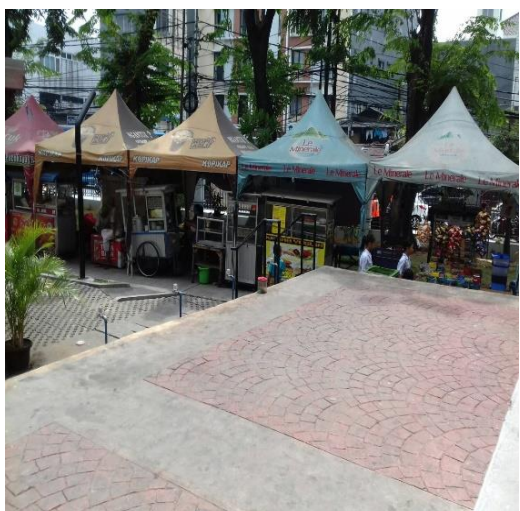
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat DPRKP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan Teknis DPRKP Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN V

**DOKUMENTASI PENELITIAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DKI JAKARTA**

[illegible]

LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI PENELITIAN DI RUSUNAWA JATINEGARABARAT



LAMPIRAN VII

PEDOMAN WAWANCARA

1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta ?

a. **Standar dan Sasaran Kebijakan**

- 1) Dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa tentunya dinas memiliki standar kebijakan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan implementasi tersebut, apakah ada? Kalau ada apa saja?
- 2) Apakah DPRKP sudah melakukan kegiatan pembangunan rusunawa sesuai dengan standar yang dimiliki?
- 3) Siapa sasaran dari implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta?

b. **Sumber Daya**

- 1) Dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta sumber daya apa saja yang diperoleh?
- 2) Selain sumber daya dalam hal anggaran apakah ada sumber daya lain yang turut serta dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta sumber daya apa saja yang diperoleh?
- 3) Apakah semua sumber daya yang ada dapat membantu dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan baik?

c. **Karakteristik Agen Pelaksana**

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor perumahan dan bangunan gedung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 274 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Pengelolaan, bagaimana peran DPRKP dalam pengorganisasian implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta?

a. **Komunikasi Antar Organisasi**

- 1) Bagaimana pola hubungan DPRKP selaku pelaksana implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta?

b. **Sikap Pelaksana Implementasi Kebijakan**

- 1) Bagaimana sikap pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta?
- 2) Upaya apa yang dilakukan pelaksana kebijakan kepada masyarakat implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar?

c. **Implementasi Kebijakan**

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta berlangsung?
- 2) Siapa saja yang berhak atas hasil dari pembangunan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI Jakarta?
- 3) Apa saja fasilitas yang ditawarkan rusunawa untuk masyarakat?
- 4) Derajat perubahan seperti apa yang di harapkan DPRKP terhadap masyarakat yang telah tinggal di rusunawa?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta dalam upaya mengurangi permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta?
 - a. Apa saja Faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta?
 - b. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta?